

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KINERJA KEUANGAN  
TERHADAP KINERJA EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT**

**Wira Hendri<sup>1</sup> Rasyid Ridho Hamidy<sup>2</sup> Abdul Madjid Junaidi<sup>3</sup>**

Universitas Gunung Rinjani  
wurahendri@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi, pada Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Variabel penelitian yang digunakan dalam analisis meliputi: desentralisasi fiskal, kinerja keuangan, kinerja ekonomi, Data penelitian menggunakan data Panel yang terdiri dari gabungan 10 Kabupaten/Kota dengan rentang waktu selama periode tahun 2008 –2017 yang diperoleh dari departemen keuangan, badan pusat statistic provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model PLS.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa: (1) Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; (2) Desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi; (3) kinerja keuangan merupakan variabel mediasi secara penuh (full mediasi) dari desentralisasi fiskal ke kinerja ekonomi.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan, Kinerja Ekonomi

**1. Latar Belakang**

Otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Provinsi merupakan daerah otonom dan sekaligus wilayah administrasi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada potensi keuangan atau desentralisasi fiskal dan pengelolaan atau kinerja keuangannya. Artinya, desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan yang bagus akan berdampak terhadap kualitas kinerja ekonomi daerah. Kinerja keuangan daerah menurut Halim (2001) dapat dilihat dari: efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan, keserasiannya dan upaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di lain pihak, kinerja ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kemiskinan.

Adanya hubungan tersebut mendorong para ahli melakukan penelitian antara lain Oates (1993); Bird (1993); Bird, Ebel, dan Wallich (1995); Bahl dan Linh (1992) dan Gramlich (1993) mengatakan bahwa dengan diserahkannya beberapa kewenangan kepada pemerintah daerah, diharapkan pelayanan masyarakat semakin efisien dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga dipertegas oleh penelitian oleh Prud'homme (1995), Peterson (1996), Zang dan Zao (1998) mengatakan terdapat pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, World Bank (1997), Martinez dan McNab (2001) mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal dapat juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal dapat mendorong kearah ketidakstabilan ekonomi makro yang pada gilirannya akan menghambat pertumbuhan ekonomi sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi. Kemudian juga dipertegas oleh beberapa penelitian diantaranya, Philips dan Woller (1998), Davodi dan Zao (1998) untuk negara-negara berkembang, serta Zang dan Zao (2001) dalam penelitiannya di Cina. Dan di Indonesia oleh Swasono (Simanjuntak, 2010).

Terlepas dari hasil studi tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi yang beragam tersebut, pendapat dan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi masyarakat cenderung diterima secara luas. Hal ini ditunjukkan dari implementasi desentralisasi fiskal yang semakin berkembang diberbagai negara, pengamatan terkini sebagaimana dikemukakan Robert (2010) menunjukkan bahwa 63 dari 75 negara berkembang dan transisional telah dan sedang melakukan desentralisasi fiskal, termasuk didalamnya adalah Indonesia. Hal tersebut menyiratkan harapan dari negara-negara tersebut bahwa dengan implementasi desentralisasi fiskal akan dapat terwujud efisiensi ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya, Pelaksanaan desentralisasi fiskal provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diketahui dari realisasi pencapaian desentralisasi fiskal yang diukur dari kemampuan PAD yang selalu berada bawah target/penganggaran PAD yang telah direncanakan. Meskipun perkembangan PAD memiliki trend yang meningkat selama lima tahun tetapi realisasinya selalu di bawah target yang direncanakan (Tabel 1.2). situasi ini mengakibatkan rencana program pemerintah untuk percepatan pembangunan daerah menjadi terhambat dan bergantung pada bantuan pemerintah pusat sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dana perimbangan yang di terima oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama lima tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,847 juta kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 sebesar 1,5 juta. Dana perimbangan dari 1,187 juta pada tahun 2013 menjadi Rp 3,222 juta pada tahun 2017. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dimana pada tahun 2017 Dana Bagi Hasil (DBH) 0,353 juta lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 0,192 juta. Begitu juga jika dilihat pada transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

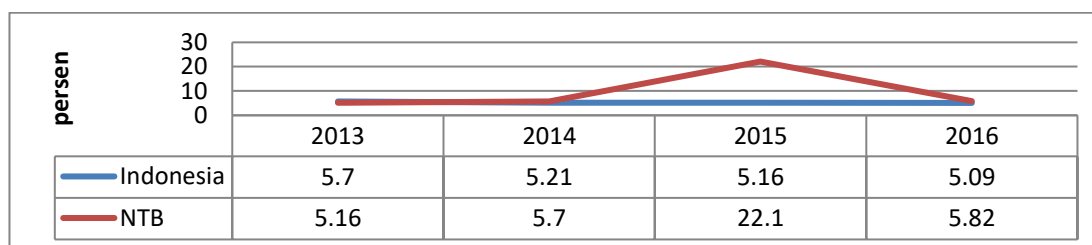
Tabel 1  
Perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Provinsi NTB Tahun 2013 - 2017  
(Dalam Juta Rupiah)

Tahun	PAD	Target PAD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Dana Alokasi Umum (DAU)	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana Perimbangan
2013	847.866	904.540	270.816	859.353	57.407	1.187.576
2014	1.194.261	1.374.112	191.154	980.390	54.663	1.226.208
2015	1.372.661	1.442.602	186.910	1.063.714	54.663	1.305.287
2016	1.450.044	1.621.041	192.824	1.117.691	255.454	1.565.970
2017	1.501.611	1.821.341	353.125	1.496.972	1.372.422	3.222.521

Sumber: Departemen Keuangan RI, 2018

Selanjutnya, dengan peningkatan penerimaan daerah pemerintah mengalokasikan belanja daerah pada program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya sebagian besar dana daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini dilihat dari realisasi belanja daerah pemerintah Nusa Tenggara Barat ditunjukkan oleh Tabel 1.3.

Bedasarkan Tabel 1.3 Selama lima tahun terakhir, realisasi belanja tidak langsung cenderung meningkat secara konsisten setiap tahun. Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2017 meningkat sebesar 2,9 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,9 juta. Demikian pula untuk belanja langsung selama tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,6 juta. Berdasarkan kontribusinya, porsi terbesar belanja daerah selama tahun 2017 berasal dari komponen belanja tidak langsung mencapai 60,39 persen, sisanya merupakan belanja langsung sebesar 39,61 persen. Pada komponen belanja tidak langsung, didominasi oleh belanja hibah mencapai 53,23 persen, diikuti oleh belanja pegawai dan belanja bagi hasil masing – masing sebesar 21,48 persen dan 20,34 persen. Sementara komponen belanja untuk bantuan sosial dan bantuan keuangan masih relatif kecil yakni masing – masing 4,19 persen dan 0,58 persen.



Gambar 1  
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTB 2013 - 2016  
Sumber: BPS, 2017

Kedua, di lihat dari indikator sosial (tenaga kerja) Pada tahun 2015 jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebanyak 10.741 orang, mengalami peningkatan sebanyak 11.324 orang tahun 2016 (BPS, 2016). Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, sehingga angka pengangguran masih terbilang tinggi.

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan yang tertinggi di Propinsi Nusa Tenggara Barat hanya ada pada Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Mataram. Tingginya PDRB per-kapita dengan rata-rata sebesar 136,45 juta rupiah lebih tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. besarnya pendapatan per-kapita Kabupaten Sumbawa Barat disumbangkan oleh sektor pertambangan dari konsentrat tembaga. Kontribusi sektor pertambangan komposisinya mencapai lebih dari 80 persen terhadap total Produk Domestik Bruto Sumbawa Barat. Kontribusi ini sebagian di nikmati Sumbawa Barat secara langsung tapi sebagian besar berupa royalti yang tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Mayoritas kontribusi Produk Domestik Bruto Kabupaten Sumbawa bersumber dari ekspor tembaga, dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar sehingga nilai pendapatan per-kapita menjadi tinggi. Jika penggalian dan pertambangan berhenti beroperasi maka Produk Domestik Bruto Kabupaten Sumbawa Barat akan mengalami penurunan.

Tabel 2  
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per-kapita  
Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2017  
(dalam Juta Rupaiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Bima	13,4	13,83	14,39	15,63	16,13	14,676
Dompu	16,31	16,69	17,32	18,41	18,2	17,386
Lombok Barat	13,28	13,48	14,12	14,53	15,18	14,118
Lombok Tengah	10,38	10,77	11,25	11,65	11,78	11,166
Lombok Timur	9,49	9,75	10,24	9,8	9,39	9,734
Sumbawa	17,6	18,33	19,29	21,22	21,02	19,492
Kota Mataram	21,8	22,42	23,72	24,91	24,63	23,496
Kota Bima	14,63	14,68	15,27	15,19	16,22	15,198
Sumbawa Barat	92,78	86,11	171,87	172,56	158,96	136,456
Lombok Utara	13,29	13,46	13,96	10,9	10,5	12,422

Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, 2018 (Diolah)

Kota Mataram menempati posisi ke dua dengan rata-rata per-kapita sebesar 23,49 juta rupiah. Tingginya pendapatan per-kapita masyarakat di Kota Mataram disebabkan karena Kota Mataram sebagai tempat pusat Ibu kota provinsi juga sebagai pusat ekonomi bisnis seperti sektor jasa yang sangat berkembang dan juga tempat wisata. Padahal kalau dilihat dari letak geografisnya daerah-daerah tersebut yang memiliki tingkat PDRB per-kapita yang tinggi dikelilingi oleh daerah-daerah yang memiliki PDRB per-kapita yang rendah walaupun sumber daya alam di daerah-daerah tersebut tidak banyak berbeda. Tabel 1.4 juga menunjukkan masih ada jarak yang cukup jauh antara PDRB per-kapita Kabupaten/Kota di provinsi Nusa Tenggara

Barat. Hal ini terlihat dari nilai PDRB per-kapita tertinggi pada tahun 2017 diduduki oleh Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai sebesar 158,96 juta rupiah. Sedangkan PDRB per-kapita Kabupaten Lombok Timur merupakan yang terendah, hanya sebesar rata-rata 9,3 juta rupiah. Perbedaan akan sumber daya dan juga infrastruktur memang sangat mempengaruhi daerah Nusa Tenggara Barat tetapi dilihat dari ketimpangan PDRB per-kapita dari yang tertinggi hingga terendah sangat jauh perbedaannya. Hal ini menunjukkan masih belum meratanya distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## 2. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi dari ke 33 provinsi di Indonesia. secara administrasi provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup 10 Kabupaten/Kota yang terdiri dari: 1) Kabupaten Lombok Timur; 2) Kabupaten Lombok Tengah; 3) Kabupaten Lombok Barat; 4) Kabupaten Lombok Utara; 5) Kabupaten Sumbawa; 6) Kabupaten Sumbawa Barat; 7) Kabupaten Bima; 8) Kota Bima; 9) Kota Mataram; 10) Kabupaten Dompu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif yang di cari berupa data desentralisasi Fiskal, kinerja keuangan, kinerja ekonomi, Untuk data kualitatif lebih mengarah pada penggambaran atau mendeskripsikan variabel yang diamati.

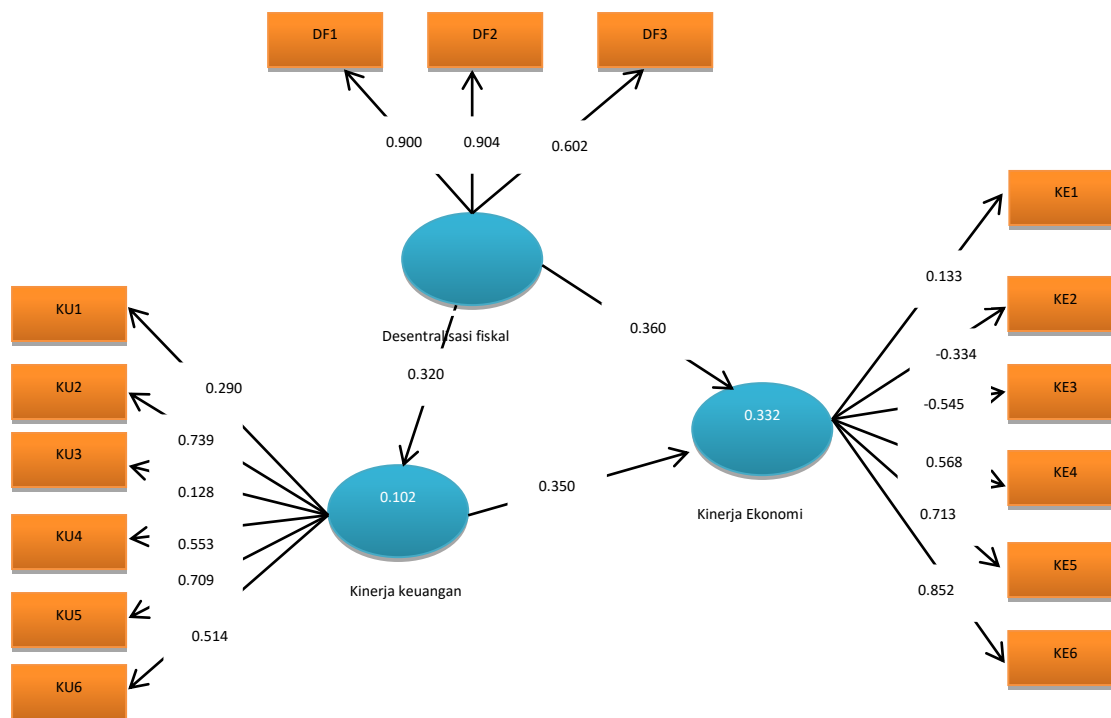
Sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari keterangan lisan atau tulisan melalui sumber yang ke dua. data sekunder diperoleh dari dokumen publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditinjau dari dimensi waktu penelitian ini menggunakan data panel (*pooled data*) yaitu jenis data yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* (Winarno, 2009). Data *time series* dilakukan selama 10 tahun periode 2008 – 2017 dan data *cross section* dilakukan sebanyak 10 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga data panel jumlahnya menjadi 100 pengamatan.

Dalam metode analisis dengan menggunakan PLS terdapat dua hal yang harus dilakukan. Pertama, dengan menilai *measurement* model atau *outer* model adalah melakukan penilaian terhadap validitas dan reliabilitas variabel penelitian. Terdapat tiga kriteria untuk menilai *outer* model, yaitu *convergent validity*, *composite reliability*, dan *discriminant validity*. Kedua, dengan menilai inner model atau *structural* model. Pengujian terhadap *inner* model atau *structural* model dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari suatu model penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, model Kajian Desentralisasi Fiskal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada Gambar 2



Gambar 2  
Model Kajian Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Kinerja Ekonomi  
Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Sumber: Lampiran

Evaluasi model pengukuran dengan indikator reflektif dievaluasi dengan *Convergent Validity*, dan *discriminant validity* untuk blok indikator.

*Convergent validity* dapat dilihat dari nilai *outer loading* antar variabel terukur dan konstraknya. Nilai *outer loading* yang ditoleransi adalah 0,50 apabila kurang dari 0,50 dapat dipertimbangkan jika nilai t hitung tidak kurang dari 1,96 (atau signifikan pada  $\alpha = 5\%$ ). Nilai *outer loading* disajikan pada Tabel 5.25.

Model baru setelah dikeluarkan indikator KE3 dapat diuji *discriminant validity* dengan melihat nilai *cross loading*. Nilai korelasi indikator dengan konstraknya harus lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara indikator dengan konstruk lainnya. Berikut ditampilkan nilai *cross loading* indikator dengan konstraknya pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa nilai *cross loading* setiap indikator lebih tinggi pada konstraknya dibandingkan terhadap konstruk lainnya. kelayakan konstruk yang dibuat juga dapat dilihat melalui nilai *Composite Reliability* (CR), *Cronbachs Alphan* dan *Average Variance Extracted* (AVE) yang pada umumnya digunakan untuk indikator reflektif, bertujuan untuk mengukur konsistensi internal

suatu konstruk. Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbachs Alpha* disajikan pada Tabel 5.30 dan Nilai AVE disajikan pada Tabel 5.27.

Berdasarkan Tabel 5.30 variabel yang mempunyai nilai realibilitas komposit yang memenuhi ketentuan adalah variabel Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah karena memiliki nilai *Composite Reliability* > 0,7 dan nilai *Cronbachs Alpha* > 0,6. Variabel Kinerja Ekonomi memiliki nilai *Composite Reliability* < 0,7 dan *Cronbachs Alpha* < 0,6 sehingga tidak memenuhi ketentuan nilai batas yang dapat diterima.

Tabel 5.26  
*Cross Loading* Indikator Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Masing-Masing Konstruknya

Konstruk	Indikator	DF	KU	KE
Desentralisasi Fiskal	DF1	<b>0,900</b>	0,127	0,401
	DF2	<b>0,904</b>	0,510	0,428
	DF3	<b>0,624</b>	-0,237	0,299
Kinerja Keuangan	KU2	0,304	<b>0,750</b>	0,324
	KU4	0,328	<b>0,577</b>	0,323
	KU5	0,151	<b>0,682</b>	0,108
	KU6	0,225	<b>0,808</b>	0,442
Kinerja Ekonomi	KE4	0,437	0,078	<b>0,547</b>
	KE5	0,188	0,307	<b>0,740</b>
	KE6	0,493	0,521	<b>0,861</b>

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 5.27 variabel yang mempunyai nilai realibilitas komposit yang memenuhi ketentuan adalah variabel Desentralisasi Fiskal, Kesejahteraan Masyarakat, Ketimpangan Pendapatan dan Kinerja Keuangan Daerah karena memiliki nilai *Composite Reliability* > 0,7 dan nilai *Cronbachs Alpha* > 0,6. Variabel Kinerja Ekonomi memiliki nilai *Composite Reliability* < 0,7 dan *Cronbachs Alpha* < 0,6 sehingga tidak memenuhi ketentuan nilai batas yang dapat diterima.

Tabel 3  
*Composite Reliability dan Cronbachs Alpha* Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Ekonomi

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>
Desentralisasi Fiskal	0,857	0,735
Kinerja Keuangan Daerah	0,800	0,671

Kinerja Ekonomi	0,544	0,087
-----------------	-------	-------

Sumber: Lampiran

Tabel 4

Nilai *Average Variance Extracted*(AVE)Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Ekonomi

Konstruk	Average Variance Extracted (AVE)
Desentralisasi Fiskal	0,857
Kinerja Keuangan daerah	0,800
Kinerja Ekonomi	0,544

Sumber: Lampiran

Berdasarkan Tabel 5.28 dapat diketahui bahwa konstruk desentralisasi fiskal, kesejahteraan masyarakat, ketimpangan pendapatan, kinerja ekonomi dan kinerja keuangan daerah memiliki nilai AVE diatas 0,50 sehingga dikatakan baik.

Model penelitian yang baik memiliki nilai *R-Square* yang besar pada variabel konstruknya. Hasil olahan R<sup>2</sup> pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5.29.

Tabel 5

Nilai *R Square* untuk Variabel Konstruk Endogen

Variabel	R-square	Keterangan
Kinerja Keuangan (X <sub>2</sub> )	0,114	Lemah
Kinerja Ekonomi (Y <sub>1</sub> )	0,320	Lemah

Sumber: Lampiran

Tabel 5.29 menunjukkan nilai R-square 0,114 untuk konstruk kinerja keuangan artinya bahwa variabilitas konstruk kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh konstruk desentralisasi fiskal sebesar 11,4 persen sisanya sebesar 88,6 persen dijelaskan oleh faktor lain selain desentralisasi fiskal. Selanjutnya variabilitas konstruk kinerja ekonomi dijelaskan oleh konstruk desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan sebesar 32,5 persen dan sisanya sebesar 67,5 persen dijelaskan oleh faktor lain selain keduanya.

Berdasarkan R<sup>2</sup> pada Tabel 5.32 maka dapat dihitung Q<sup>2</sup> atau Stone Geiser Q-square test yaitu :

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - \{(1 - 0,114)(1 - 0,320)\} \\
 &= 1 - \{(0,886)(0,68)\} \\
 &= 1 - 0,60 \\
 &= 0,40
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan Q<sup>2</sup> sebesar 0,40 sehingga dapat dikatakan memiliki *prediktif prevelance* yang baik sehingga model yang dihasilkan layak digunakan untuk memprediksi, angka 0,40 dapat diartikan bahwa variasi kesejahteraan



masyarakat sebesar 40 persen mampu dijelaskan oleh variasi desentralisasi fiskal, kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Sedangkan sisanya sebesar 60 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Analisis pengaruh langsung, tidak langsung maupun pengaruh total dapat dijelaskan pada hubungan antarvariabel penelitian (variabel laten). Variabel dimaksud yaitu desentralisasi fiskal, kinerja keuangan, kinerja ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Tabel 5.30 dapat dijelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan kinerja ekonomi daerah. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kinerja ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, kinerja keuangandaerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, ketimpangan pendapatan dan kinerja ekonomi.

Tabel 6  
*Path Coefisient* Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah, Kinerja Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antar variabel	Original sampel	Standard Deviation	T statistik	P values
Desentralisasi Fiskal→ Kinerja Ekonomi	0,350	0,096	3,628	0,000
Desentralisasi Fiskal→ Kinerja Keuangan Daerah	0,338	0,113	3,003	0,003
Kinerja Keuangan Daerah→ Kinerja ekonomi	0,342	0,093	3,680	0,000

Sumber: Lampiran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan indikator pengeluaran, indikator pendapatan dan indikator otonomi mampu menjelaskan dengan baik perkembangan kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, upaya fiskal dan pertumbuhan pendapatan daerah. Hasil studi ini mendukung hipotesis pertama yaitu desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas desentralisasi fiskal, maka akan semakin baik kinerja keuangan daerah yang ditunjukkan oleh meningkatnya indikator rasio kemandirian, rasio efektivitas, upaya fiskal dan pertumbuhan pendapatan daerah.

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya Syahrudin, 2006; Siddik, 2002; Fontanella dan Rossieta, 2014; Lay, 2001; Kurniasih, 2011; dan Mursinto, 2004 dimana desentralisasi fiskal mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa koefisien seluruh indikator pada desentralisasi fiskal menunjukkan positif dan signifikan, yang berarti keseluruhan indikator memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun pengaruhnya berasal dari bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan masih mendominasi sumber penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber yang berasal dari pendapatan riil daerah seperti PAD. Hal ini dapat diketahui uji kontribusi yang dilakukan selama periode penelitian dari Tahun 2008 - 2017 menemukan bukti bahwa mayoritas pengelolaan keuangan daerah sumber dananya berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat mencapai 80,6 persen dari total penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan, sementara PAD hanya memberikan kontribusi 8,4 persen dari total penerimaan daerah (Lampiran 16).

Temuan ini mendukung penelitian Astuti dan Joko (2015) menunjukkan hampir semua daerah di Indonesia Rasio DAU terhadap total pendapatan daerah melebihi angka 50 persen. Sementara dilihat dari Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah terlihat bahwasan 200 rah yang PADnya besar tidak berubah dari daerah yang berada di pulau Jawa notabene memiliki populasi penduduk paling besar. Sedangkan daerah diluar pulau Jawa masih menunjukkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan. Hanya provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Lampung yang menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode penelitian 2008 - 2017 desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi. Hal ini berarti semakin baik kualitas desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja ekonomi daerah. Temuan ini membuktikan adanya hubungan searah antara desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan terhadap kinerja ekonomi. Hasil studi ini mendukung pandangan yang pro desentralisasi fiskal seperti Tanzi, 1996, Litvack et al. 1998, Tiebout, 1956, Oates, 1972, Tresch, 198, Breton, 1996, Weingast, 1995, Akai dan Sakata, 2002, Thiessen, 2003, dan Desai et al. 2003. dimana desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi.

Adanya hubungan yang Positif dan signifikan dari variabel desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan terhadap kinerja ekonomi disebabkan karena adanya peran penting dari belanja daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Belanja daerah merupakan komponen utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung merupakan komponen pengeluaran daerah yang sudah pasti terjadi karena bersifat untuk pendanaan kegiatan rutin terutama untuk aparatur daerah pada daerah yang bersangkutan, misalnya belanja modal untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri dan honorarium sebagai kompensasi bagi pegawai negeri terhadap aktivitas kegiatan yang dilakukan di daerah. Penerimaan gaji pegawai negeri dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan

membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen/para pengusaha untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi.

Berdasarkan uji regresi sederhana menggunakan aplikasi eviews 3.0 selama periode penelitian 2008 - 2017 membuktikan belanja daerah mampu mendorong kinerja ekonomi yang dilihat dari indikator penduduk diatas garis kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan modal per-kapita dan PDRB per-kapita daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 7  
Ringkasan Hasil Estimasi Uji Regresi

Hubungan Variabel	Koefisien	t-hitung	sig
Belanja daerah → penduduk di atas garis kemiskinan	0.49	4.138372	0.0001
Belanja Daerah → penyerapan tenaga Kerja	0.27	3.843916	0.0002
Belanja Daerah → pembentukan modal perkapita	0.05	3.101380	0.0025
Belanja Daerah → PDRB Per-kapita	0.05	3.933581	0.0002

Sumber: Lampiran 14

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien regresi pada arah hubungan belanja daerah terhadap penduduk di atas garis kemiskinan bernilai positif sebesar 0,49 persen, nilai t-hitung 4,13 dan signifikan 0,001 (lebih kecil dari 0,05) artinya semakin tinggi belanja daerah maka jumlah penduduk yang berada diatas garis kemiskinan akan semakin bertambah. Selanjutnya. Pada arah hubungan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja bernilai positif sebesar 0,27, nilai t-hitung 3,8 dan signifikan 0,0002 (lebih kecil dari 0,05) artinya semakin tinggi belanja daerah maka penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat. Demikian pula nilai koefisien pada arah hubungan belanja daerah terhadap pembentukan modal per-kapita dan PDRB per-kapita bernilai positif sebesar 0,04 dan 0,05 dengan t-hitung 3,1 dan 3,9 dan signifikan 0,0025 dan 0,0002 (lebih kecil dari 0,05) artinya semakin tinggi belanja daerah maka, pembentukan modal per-kapita dan PDRB per-kapita akan semakin meningkat.

Temuan studi ini juga mendukung hasil studi Mursinto di Jawa Timur (2004). Hasil studinya menyimpulkan bahwa, pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil itu di ketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar akan mendorong kenaikan PDRB daerah. Untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi diperlukan peran serta swasta dan masyarakat yang semakin besar.

Peningkatan kinerja ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak terlepas dari peran yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah, yaitu melalui penerapan indikator-indikator desentralisasi fiskal yaitu antara lain rasio pengeluaran, pendapatan dan drajat otonomi, dan kinerja keuangan antara lain rasio kemandirian, rasio efektifitas, upaya fiskal dan pertumbuhan PAD sehingga berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah penduduk yang berada diatas garis kemiskinan, semakin terserapnya tenaga kerja didalam dunia kerja, pembentukan modal perkapita dan PDRB per-kapita.

Belanja daerah yang tepat sasaran terutama pada belanja modal akan sangat mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran. Belanja modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah akan mempengaruhi semakin lancarnya proses pembangunan daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur berarti adanya penambahan aset daerah yang bisa menjadi penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Kondisi inilah yang akan membuat kinerja keuangan daerah akan semakin meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan melalui belanja daerah mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah yang dilihat dari indikator jumlah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pembentukan modal perkapita dan PDRB per-kapita daerah.

#### **4. KESIMPULAN**

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan faktor kontribusi penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah. Berdasarkan uji kontribusi ditemukan bukti bahwa kontribusi dana perimbangan mencapai 86,4 persen dari total penerimaan daerah yang digunakan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah.

Desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah dikarenakan faktor pengeluaran daerah yang berasal dari belanja daerah sebagai komponen pengeluaran paling besar dibandingkan pengeluaran lainnya berdampak positif terhadap kenaikan kinerja ekonomi daerah. Berdasarkan uji signifikansi menggunakan model regresi sederhana ditemukan bukti bahwa selama periode penelitian belanja daerah signifikan mendorong peningkatan kinerja ekonomi yang terdiri dari penyerapan tenaga kerja, penduduk di atas garis kemiskinan, pembentukan modal perkapita dan PDRB per-kapita dengan signifikansi kurang dari 0,05.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akai, & Sakata. 2005. Fiscal Decentralization, Commitment and Regional Inequality: Evidence Fromstate Level Cross-Sectional Data For The United States. *Osaka: Osaka International University*.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, UPP YPKN, Yogyakarta.
- Astuti, Esther S dan Haryanto. 2005. Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Era Otonomi Daerah Studi Kasus 30 Provinsi. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia, No.12/TH XXXIV*.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *PDRB Propinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota*. Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia 2008 - 2017*. BPS, Nusa Tenggara Barat.

- Badan Pusat Statistik. 2014. *NTB Dalam Angka*. Katalog BPS 1102001.52 Mataram: BPS Nusa Tenggara Barat.
- Bonet, Jaime. 2006. Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from the Colombian Experience. *The Annals of Regional Science* 40(3): 661-676.
- Bird, Richard M., & Francois Vailancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara - Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Bonet, J. A. 2005. Decentralization, Structural Change and Regional Disparities in Colombia. *United States: University of Illinois at Urbana-Champaign*.
- Bonet, J. 2006. *Fiscal decentralization and regional income disparities: Evidence from the Columbian experience*. *The Annals of Regional Science*, 40, 661-676
- Darma, E.S. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah. *Tesis*. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta.
- Davoodi, H., & Zou, Heng-fu. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study. *Journal of Urban Economics*, 43:244-57.
- Departemen Keuangan. 2018. *APBD 2008 - 2018*. [http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data\\_dkd/setelah\\_2006/2011/LGF%20Realisasi%203rd%20Quarter%20-%202011.zip](http://www.djpk.depkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2011/LGF%20Realisasi%203rd%20Quarter%20-%202011.zip) diakses pada 10 Desember 2018).
- Dewanto, Pendi. 2014. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap Pengentasan kemiskinan di kawasan mebidangro. *Jurnal Ekonom*, Vol 17, No 3, Juli 2014.
- Efriza, Ulfie. 2014. Analisis Kesenjangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal. (*Jurnal Ilmiah*). Universitas Brawijaya Malang.
- Elmi, B. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Galbraith, James K., and Hyunsub Kum. 2012. Inequality and Economic Growth: Data Comparisons and Econometric Tests. UTIP Working Paper Number 21.
- Ganie, dkk. 2019. Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indian States. *South Asian Journal of Macroeconomics and Public Finance* 7(1) 83–108
- Ghozali. 2011. *Persamaan Structural, Konsep dan Aplikasi Dengan Program AMOS*. Semarang: BP.UNDIP.
- Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit – Universitas Diponegoro.
- Gregorius, Andros. 1996. The Impact of Government Expenditur on Growth: Empirical Evidence From a Heterogeneous Panel, *C33, E62*.

- Halim, Abdul dan Jamal A Nasir. 2006. "Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang". *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 06/TH XXXV.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi, 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol III No. 1, Juni
- Hsiao, C. 2004. *Random coefficient models, The Econometrics of Panel Data*, L.
- Kuznet, Simon. 1995. Quantitative Aspec of the Economic Growth of Nation : I. Economic Development and Cultiral Change, Vol. V.
- Imi, Atsushi. 2005. *Decentralization And Economi c Growth Revisited: An empirical note*. *Journal of Urban Economics*, 57 (2005) 449-461.
- Makreshanska dan petrevski. 2016. Decentralization, Fiscal Transfers and Income Inequality in Central and Eastern European countries. *Online at <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/82181/> MPRA Paper No. 82181, posted 26 October 2017 22:26 UTC*.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Macroeconomics*, 4<sup>th</sup> Edition, Worth Publisher, Madison, Avenue, New York.
- Mardiasmo. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi: 2005 - 2008. Dalam Abimanyu, Anggito & Megantara, Andie. Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Sugiyono. 2003, *Handbook for Administration Metodology Reseach*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sjafrizal, 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma*, 3 Maret.
- Sjafrizal. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. *Prisma LP3ES, No 3 Tahun XXVI*.
- Todaro, Michael, P., 1997. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.
- Todaro, Michael, P. 2004. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P., & Smith Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi (Yelvi Andri, Penerjemah)*, Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Thresch, Richard W. 1981. *Public Finance: A Normative Theory*. California: Academic Press.
- Utama, Suyana. 2006. Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *Disertasi*. Surabaya: Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.

- Utama, Suyana. 2009. *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Bali Selatan Tahun 2001-2007*. Laporan Penelitian Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Udayana.
- Wetzels. 2002. Using Pls Path Modeling for Assessing Hierarchicalconstruct Models: Guidelines and Empirical illustration. *MIS Quarterly Vol. 33 No. 1*.
- Woller, M. Gary, & Phillips Kerk. 1998. Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion. *The Journal of DevelopmentStudies; Vol.34 (4)*.
- Williamson, J. G. 1997. *Regional and Equity and the Process of National Development; A Description of Patern Economics and Cultural Change*, Vol. 13, No. 4: 3-45.
- Work. 2002. *Overview of decentralization worldwide: A stepping stone to improved governance and human development*. Manila 2nd International Conference on Decentralization.
- Wulandari. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah (Vol. 5, No. 2)*. November.
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics, 45: 228-239*.
- Yamoah, Afia Boadiwaa. 2007. *The Effects Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties*. Dessertation, The Ohio State University.
- Zhang Tao, & Zou Heng-Fu. 1998. Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China. *Journal of Public Expenditure, 67: 221- 240*.